

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul latif. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Agusniwan Etra. 2021. *Hak Politik Mantan Narapidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*. PT. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artidjo Alkostar. 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta:Ind-Hill.Co
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Bambang waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bambang Widjoanto. 2009. *Kajian Putusan MK Tentang Pemilu Dan Pemilukada*. Jakarta: Kemitraan.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawie Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- D. Schaffmeister, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan hukum dengan pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusamedia.
- E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Hans Kelsen. 1995. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Hukum Empiric-Deskriptif*. Alih Bahasa Oleh Drs. Somardi. Bandung: Rimdi Press.
- Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books.
- Mahfud MD. 1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadia Media.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokrasi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

B. JURNAL

- Budi Aji. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Surat Dakwaan Tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No. 1948/Pid.B/2013/ PN.LP*. Universitas Medan Area (Bab II).
- Dennis Efraim Purba. 2021. *Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum 4,1.
- Dina Fajar Indah. Haris Retno Susmiyati, dan Rini Apriyani. 2020. *Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia*. Risalah hukum 16(2).
- Enha Sorandri Tahir. 2021. *Kebijakan Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi di Indonesia*. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum.
- Faisal. 2018. *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. jurnal keadilan progresif 9,2.
- Hafrida. 2013. *Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara No. 01/Pid.B/Tpk/2012/Pn. Jbi*. Jurnal Ilmu Hukum, 6, 2.
- Hikmahanto Juwana, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Departemen Hukum dan HAM.
- Husin Wattimena. 2017. *Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan bagi pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi*. Ambon: deepublish.
- Ifdal Kasim. 2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ifdal Kasim. 2007. *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebah Pengantar*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ivon Rista Veranda. 2015. *Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Juliani Grace Rori. 2018. *Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi*. Lex Crimen Vol. VII.

Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2015.

Mardenis. 2013. *Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 2(3).

Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. 2020. *Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan PerUndang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, 17, 2.

Ramadani & Mamonto. 2019. *Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia*. PETITUM, Vol. 7, No.2.

Rangga Alfauzi. 2015. *Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*. Universitas Islam Indonesia.

Sabungan Sibarani. 2019. *Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Sapto Budoyo. 2014. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV, No 2.

Yosi Dewi Mahayanthi. 2015. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

C. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *IrJen. Djoko Susilo*, Nomor 537 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Luthfi Hasan Ishaaq*, Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Anas Urbaningrum*, Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, diucapkan terbuka untuk umum pada hari selasa 11 desember 2007, penggabungan kedua

perkara tersebut menjadi satu naskah dalam putusan ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 Desember 2007

D. UNDANG-UNDANG

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : UU RI No. 46 Th. 2009*, Cetakan Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan II, 2014: Pustaka Buana.

E. WEBSITE

Alfin Sulaiman. “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu”, <https://www.hukumonline.com>. Diakses 26 January 2022.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. “*Pencabutan hak politik bukanlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM)*”, Diakses pada 4 oktober 2021 .

<https://acch.kpk.go.id> “Pencucian Uang Anas Urbaningrum”. Diakses pada 17 May 2022.

<https://detik.com> “MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan di Kasus Korupsi Sapi" diakses pada 17 May 2022.

<https://nasional.sindonews.com> "Ini Petikan Lengkap Amar Putusan PK Anas Urbaningrum". Diakses pada 17 May 2022.

<https://tirto.id> “ *ketika pencabutan hak politik tak mematikan karier politisi*” , diakses pada 29 september 2021.

<https://tirto.id>. “ *Pencabutan hak politik tidak mematikan karier politisi*”, Diakses pada 18 september 2021.

<https://www.hukumonline.com> “Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu”. Diakses 26 January 2022.

<https://www.idntimes.com>. “ *Pencabutan hak politik warga negara bagaimana aturannya*” diakses pada 4 oktober 2021.

Oce Madril, <https://nasional.sindonews.com>, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dinilai Belum Beri Efek Jera. Diakses pada 18 Desember 2021.